

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peranan penting dalam menunjang fondasi ekonomi nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja serta pementapan ekonomi daerah. Berdasarkan laporan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2022), UMKM di Indonesia memberikan sumbangsih sebesar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Dalam kerangka hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan usaha kecil sebagai entitas ekonomi yang mandiri, berorientasi laba, dan dijalankan tanpa ketergantungan terhadap pelaku usaha berskala lebih besar. Fenomena ini menjelaskan mengapa sebagian besar masyarakat Indonesia memilih untuk mendirikan dan mengelola UMKM sebagai strategi untuk menjaga keberlangsungan ekonomi dan meningkatkan kemandirian finansial secara jangka panjang.

Mengacu pada data yang dirilis oleh lembaga pemerintah yang menangani Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta unit pada tahun 2023, tercatat mengalami kenaikan hingga 1,7% bila dikaitkan dengan periode tahun 2022. Pertumbuhan ini tidak lepas dari karakteristik UMKM yang umumnya memproduksi barang atau jasa yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga memiliki tingkat permintaan yang relatif stabil dan tinggi di pasar domestik. Dengan jumlah UMKM yang terus meningkat dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, persaingan antar pelaku usaha juga semakin ketat. Namun, dalam perkembangannya, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja mereka, diantaranya rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan akses terhadap modal yang masih belum optimal. Tantangan ini semakin kompleks dengan pesatnya perkembangan teknologi digital yang

menuntut pelaku UMKM untuk memiliki literasi digital yang memadai (Suardana & Musmini, 2020).

Pertumbuhan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun (Winarso et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa DIY dikenal sebagai wilayah dengan perekonomian yang didominasi oleh sektor UMKM. Bertambahnya jumlah UMKM ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2024, total UMKM di Provinsi DIY mencapai 322.035 unit usaha. Keberadaan UMKM di wilayah ini memiliki peran strategis serta kontribusi yang signifikan dalam perekonomian daerah. Distribusi jumlah UMKM kabupaten/kota DIY menunjukkan variasi yang berbeda-beda, salah satunya terdapat di Kabupaten Bantul 93.846 unit, Kabupaten Gunungkidul 58.806 unit, Kabupaten Kulon Progo 38.193 unit, Kabupaten Sleman 88.999 unit, dan 42.191 unit untuk Kota Yogyakarta. Dari data di atas, terlihat bahwa Kabupaten Bantul memiliki jumlah UMKM tertinggi yaitu 93.846 unit. Dengan data yang ada, UMKM terus menjadi tulang punggung perekonomian di DIY dan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Kabupaten Bantul merupakan wilayah dengan konsentrasi UMKM tertinggi di Provinsi DIY. Kabupaten ini berposisi di wilayah selatan DIY dan terletak berdampingan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, serta Samudra Hindia di bagian selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul berada dalam rentang koordinat geografis antara  $07^{\circ}44'04''$  hingga  $08^{\circ}00'27''$  Lintang Selatan serta  $110^{\circ}12'34''$  hingga  $110^{\circ}31'08''$  Bujur Timur, dengan cakupan wilayah mencapai 506,85 km<sup>2</sup>. Dilihat dari struktur pemerintahan wilayah ini terdiri dari 17 kapanewon (kecamatan), 75 kelurahan (desa/kelurahan), dan 933 padukuhan (dusun). Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Bantul pada tahun 2024 tercatat mencapai 1.017,75 ribu jiwa, dengan sebagian besar tergolong dalam usia produktif (15–64 tahun), yang menjadi modal demografis penting bagi pengembangan sektor

UMKM di wilayah ini. Dengan didominasi oleh penduduk di usia produktif, Kabupaten Bantul memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor UMKM, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai sumber tenaga kerja. Sejalan dengan itu, data dari BPS menunjukkan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja serta lonjakan nilai produksi sektor industri mikro dan kecil, yang tercatat telah melampaui Rp15 triliun. Hal ini mencerminkan kontribusi nyata UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudahan akses UMKM bagi berbagai kalangan serta kemampuannya dalam beradaptasi dengan perubahan menjadikan sektor ini merupakan elemen kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul secara berkelanjutan (Suharson 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa literasi keuangan mencakup kompetensi, pemahaman, dan keyakinan dalam mengelola keuangan secara bijak guna mencapai kesejahteraan. Meskipun tingkat literasi keuangan nasional menunjukkan lonjakan signifikan dari 29,7% pada 2016 menjadi 65,43% pada 2024, sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Bantul masih menghadapi masalah rendahnya literasi keuangan. Banyak dari mereka menjalankan usaha secara tradisional tanpa pencatatan keuangan yang memadai, tidak memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan seperti pemisahan uang pribadi dan usaha, serta kurang mampu menilai risiko dan merencanakan keuangan secara efektif. Kondisi ini berdampak negatif pada pengambilan keputusan usaha, menyebabkan kesulitan dalam mengatur arus kas, mengelola utang, dan merespon pertumbuhan ekonomi, sehingga berdampak pada rendahnya efisiensi dan kinerja bisnis para pelaku usaha (Zairina et al., 2023). Maka dari itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan literasi keuangan melalui pelatihan, pendampingan, dan akses informasi yang sesuai, agar para pelaku usaha mampu membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana serta memperkuat keberlanjutan dan daya saing usaha mereka.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menjadikan literasi keuangan sebagai bagian dari inisiatif besar dalam program *Smart Economy* pada

kerangka *Smart City*. Melalui dimensi ini, pemerintah bertujuan membangun tiga pilar utama: ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan, termasuk digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung masyarakat. Namun demikian, belum ada evaluasi khusus dan terukur yang secara eksplisit menilai keberhasilan peningkatan tingkat literasi keuangan masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan masih dinilai dalam konteks umum program *Smart Economy*, sehingga efektivitas peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keuangan belum bisa dinilai sepenuhnya.

Akses terhadap modal juga memainkan peran krusial dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Akses modal berkontribusi positif terhadap perekonomian negara dan menjadi sumber pendanaan penting untuk mendukung keberlanjutan UMKM (Kartini et al., 2024). Walaupun UMKM memiliki peran penting untuk perkembangan ekonomi, akses mereka terhadap layanan keuangan masih menjadi tantangan besar (Ningsih et al., 2023). Winarso et al. (2019) menyatakan bahwa salah satu langkah pemerintah untuk mendukung perkembangan UMKM adalah dengan menerapkan program pembangunan UMKM, baik melalui Kementerian UMKM maupun lembaga perbankan.

Kabupaten Bantul, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah kendala dalam upaya mendapatkan pendanaan. Kendala yang paling sering terjadi adalah ketakutan akan bahaya utang, kurangnya agunan, dan minimnya pengetahuan tentang pengelolaan administrasi keuangan. Menurut penelitian Fathurrahman et al., (2019), banyak pelaku UMKM di Bantul yang masih memiliki opini negatif terhadap pinjaman lembaga keuangan karena menganggap proses pengajuannya sulit dan bunga yang dibebankan terlalu tinggi. Untuk menanggulangi hal ini, Pemkab Bantul, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DisKUKMPP) telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak perbankan dan pelaku usaha yang menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan pendanaan. Namun, minimnya kegiatan

sosialisasi dan dukungan langsung bagi pelaku usaha membuat program ini belum berjalan maksimal.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan digitalisasi sebagai fokus utama untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi bagi UMKM. Selain menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi, digitalisasi juga meningkatkan efektivitas kinerja UMKM melalui peningkatan literasi keuangan dengan menyediakan platform edukasi finansial berbasis teknologi, memperluas akses modal melalui *fintech*, serta mengoptimalkan pemasaran digital (Octavina & Rita, 2021). Literasi keuangan yang baik memungkinkan pelaku UMKM mengambil keputusan finansial yang lebih bijak sementara akses modal yang memadai mendukung stabilitas usaha (Herliana & Siregar, 2025). Namun, tanpa adanya dukungan digitalisasi beberapa faktor ini mungkin tidak memberikan dampak maksimal terhadap kinerja UMKM.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan basis pengguna internet terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 221,56 juta pengguna pada tahun 2024 (APJII). Kondisi ini menghadirkan peluang besar dalam pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Namun, tanpa adopsi teknologi yang optimal, produk lokal berisiko tersaingi oleh produk asing yang semakin deras masuk ke pasar domestik (Afrida et al. 2021). Kabupaten Bantul menunjukkan peran strategis sebagai pusat ekonomi kreatif berbasis teknologi. Daerah ini berhasil mengintegrasikan sektor industri kecil, kerajinan tradisional, dan digitalisasi ke dalam satu ekosistem yang kuat (Widodo et al., 2021). Terdapat lebih dari 24.000 unit industri kecil di Bantul yang menyerap lebih dari 100.000 tenaga kerja. Produk kreatif unggulan seperti keramik kasongan, batik, dan kerajinan kayu telah berhasil diekspor dengan nilai mencapai jutaan dolar (DPMPTSP Kabupaten Bantul 2022).

Pemerintah daerah membentuk Komite Ekonomi Kreatif (KEK) yang melibatkan kolaborasi hexahelix yakni pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan. Kolaborasi ini bertujuan mendorong inovasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta penguatan

branding global, termasuk upaya untuk bergabung dalam jejaring Kota Kreatif Dunia UNESCO. Pelaku UMKM dan industri kreatif di Bantul juga mulai menggunakan media digital seperti jejaring sosial dan platform *e-commerce* untuk meningkatkan eksposur produk mereka ke pasar yang lebih luas. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di kawasan tersebut tidak hanya berbasis budaya dan potensi lokal, tetapi juga didorong oleh pemanfaatan teknologi digital secara progresif (DPMPTSP Kabupaten Bantul 2022).

Kabupaten Bantul juga telah menjadi lokasi aktif pelaksanaan program SiBakul Jogja, yang bertujuan memperkuat konektivitas ekosistem UMKM digital di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi geografis yang strategis serta dominasi penduduk usia produktif memberikan keunggulan kompetitif bagi Bantul dalam mengembangkan kewirausahaan digital. Sektor yang berkembang mencakup kuliner, kerajinan, pariwisata, dan industri kreatif secara berkelanjutan (Qonita & Atmojo 2024). Infrastruktur digital yang terus tumbuh, didukung oleh jumlah UMKM yang besar dan kolaborasi antar pelaku usaha, menjadikan Bantul sebagai wilayah yang prospektif dalam ekonomi kreatif berbasis teknologi. Hal ini membuktikan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di Bantul tidak hanya bertumpu pada potensi budaya lokal, tetapi juga digerakkan oleh transformasi digital yang progresif dan integritas.

Hasil penelitian Modhe (2024) menunjukkan bahwa kinerja UMKM yang optimal berkontribusi terhadap keberlangsungan usaha serta peningkatan kualitas bisnis, yang secara tidak langsung dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia ke arah yang lebih positif. Sejalan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja UMKM menjadi aspek yang sangat Sangat penting memastikan operasional usaha mengikuti strategi yang telah dirancang sebelumnya (Pratamansyah, 2024). Temuan ini didukung oleh hasil studi yang dilakukan oleh Supriatna et al. (2023) menyatakan kinerja UMKM berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Literasi merujuk pada pemahaman yang melibatkan pengetahuan serta keterampilan dalam menangani berbagai aspek keuangan seperti pendanaan,

pengambilan keputusan investasi, dan pengelolaan aset (Syafirah et al., 2024). Menurut Reza et al. (2024), literasi keuangan memberikan dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja UMKM, selain itu penelitian oleh Suardana dan Musmini (2020) membuktikan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kinerja UMKM. Namun studi yang dilakukan oleh Maharani (2020) menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Penelitian sebelumnya oleh Kartini et al. (2024) menunjukkan bahwa akses pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil serupa juga ditemukan oleh Anggara dan Purnamawati (2023), yang menyimpulkan bahwa semakin mudah UMKM mendapatkan pembiayaan, maka kinerjanya pun semakin baik. Namun, berbeda dengan kedua penelitian tersebut, Herliana dan Siregar (2025) menemukan bahwa akses pembiayaan justru berdampak negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan kinerja UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang ada dan adanya hasil yang berbeda beda, maka penulis mengambil fokus penelitian pada judul **“Pengaruh Literasi Keuangan dan Akses Modal terhadap Kinerja UMKM dengan Digitalisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada UMKM Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada penjelasan dalam latar belakang tersebut, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Bantul?
2. Apakah akses modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Bantul?
3. Apakah digitalisasi dapat memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Bantul?

4. Apakah digitalisasi dapat memoderasi pengaruh akses modal terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Bantul?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Bantul.
2. Untuk menganalisis pengaruh akses modal terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Bantul.
3. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Bantul dengan digitalisasi sebagai variabel moderasi.
4. Untuk menganalisis pengaruh akses modal terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Bantul dengan digitalisasi sebagai variabel moderasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari studi ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktis**

Studi ini membantu pelaku UMKM di Kabupaten Bantul untuk lebih memahami peran penting literasi keuangan dan kemudahan akses permodalan dalam mendorong peningkatan kinerja bisnis mereka.

#### **2. Manfaat Teoritis**

studi ini berkontribusi pada pengembangan teori dengan menyajikan model baru yang menempatkan digitalisasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara literasi keuangan dan akses modal terhadap kinerja UMKM, serta memperkaya referensi ilmiah di bidang usaha.

#### **3. Manfaat Kebijakan**

Temuan dari studi ini berpotensi dimanfaatkan sebagai dasar acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan strategis berbasis digitalisasi guna memperkuat kemampuan UMKM dalam hal pengelolaan keuangan dan permodalan.

**E. Ruang Lingkup dan Batasan**

Digitalisasi sebagai komponen yang dapat meningkatkan atau memperkuat pengaruh tersebut, penelitian ini berupaya memperluas dampak literasi keuangan dan akses modal dalam kaitannya dengan kinerja UMKM. Kajian ini berfokus pada pelaku UMKM di Bantul.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA